

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam peradaban yang telah mengenal budaya tulis, buku menjadi bagian yang sangat penting. Akan tetapi, kejahatan terhadap produk literasi ini juga tidak kalah hebatnya dari pentingnya buku bagi peradaban. Pada peradaban-peradaban kuno, pembunuhan terhadap buku atau kita sebut *Librisida* cukup sering terjadi. Kejadian seperti ini biasanya terjadi dalam beberapa peristiwa dan juga beberapa alasan. Alasan kebencian dan jugauforia kemenangan telah mencatat sejumlah buku dihancurkan dan dibakar. Penyerangan bangsa Mongol ke Asia Barat hingga perbatasan Eropa mencatat hancurnya sejumlah buku karena dibuang dan dibakar. Alasan agama juga bisa kita temukan dalam kisah pelarangan buku-buku oleh Paus yang dirangkum dalam *Index of Prohibited books* karena dianggap mencemari pemikiran dan kepercayaan orang-orang kristiani.¹ Faktor di dalam sebuah peradaban juga bisa berlaku serupa. Peralihan kekuasaan politik sering kali diiringi dengan pembakaran atau penghancuran dari simbol-simbol masa sebelumnya, termasuk buku didalamnya.² Seorang raja baru bisa menghancurkan peninggalan

¹ Francis S Betten, *Roman Index of Prohibited Books* (London: B. Herder Book, 1909). Hal 1.

² Dalam dua Buku Rebecca yaitu Rebecca Knuth, *Libricide : The Regime-Sponsored Destruction of Books and Libraries in the Twentieth Century* (USA: PRAEGER). hlm 55 dan Rebecca Knuth, *Burning Books and Leveling Libraries : Extremist Violence and Cultural Destruction* (USA: PRAEGER, 2006). Hal 36, dijelaskan bahwa penghancuran buku eksis karena alasan politik. Hal ini diamini oleh Elyse Amend and Darin Barney, 'Getting It Right : Canadian Conservatives and the "War on Science"', *Canadian Journal of Communication*, 41 (2016).hal 20. Dua penelitian ini melihat pemberangusan buku karena alasan politik kekuasaan semata. Lihat juga lebih lanjut Dorji Wangchuk, 'Biblioclasm/Libricide in the History of Tibetan Buddhism', *Tibetan Studies*, 12 (2015). hlm 530. Dalam studi ini, penghancuran buku terjadi akibat dari alasan politik dalam satu kepercayaan agama.

raja lama yang berguna untuk menghilangkan jejak dan menggantikannya. Maka melihat hal itu, kita bisa melihat bahwa penyerangan atau penghancuran buku setua peradaban manusia itu sendiri.

Di Nusantara pada masa kerajaan juga mencatat dua kejadian besar diwilayah yang berbeda. Disini peran agama cukup nampak karena keduanya didasarkan atas pandangan keagamaan. Pada kasus pertama terjadi di Aceh abad ke 16. Banyak buku yang dibakar karena perbedaan pemikiran keagamaan. Ini terjadi ketika Nurrudin Ar-Raniri yang melakukan upaya penghilangan paham *wahdatul wujud* yang dikemukakan oleh Hamzah Fansyuri. Dari data yang didapatkan, setidaknya ada lima buku di bakar diatas alasan politik dan agama.³ Pada saat yang hampir bersamaan, proses penghancuran buku juga terjadi di kepulauan Jawa pada masa peralihan kerajaan budha ke kesultanan Islam. Jawa yang memiliki banyak kepercayaan kompleks yang notabene dipengaruhi oleh Kerajaan Budha, digantikan oleh kekuasaan Islam di abad ke 15. Pada masa tersebut, banyak buku-buku agama Budha yang tidak memiliki pandangan yang sama dengan nilai Islam yang dihancurkan oleh Muslim, meskipun beberapa buku tetap dipertahankan.⁴

Meskipun librisida dianggap telah hadir pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara, data-data yang lebih jelas terlacak ada di masa kolonial Belanda.⁵

³ Lihat Lebih lanjut, Penjeasan Abdul Hadi, *Hamzah Fansyuri Penyair Sufi Aceh* (Aceh: LOTKALA). Bahwa buku yang dibakar adalah *Asraaul Arifin fi Bayani Ilmis Suluk wa-Tauhid, Syaarabul Asyiqin, Al Muntahi* dan masih ada beberapa syair lainnya. Lihat hal 8 dan 13.

⁴ Beberapa buku legenda Budha yang tidak bertentangan dengan Islam tetap dipertahankan, lihat lebih lanjut pada A.H Johns, 'From Buddhism to Islam : An Interpretation of Javanese Literature of the Transition', *Comparative Study and Society*, 9 (1966).

⁵ Lihat Pengantar Buku ,Fauzan, *Mengubur Peradaban : Politik Pelarangan Buku Di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2003).

Sejarah mengungkapkan, seringkali bentuk-bentuk pelarangan buku di Indonesia berupa pemenjaraan atau pengasingan seseorang karena hasil karyanya secara politik berbeda dengan pandangan dan kebijakan pemerintah kolonial. Sebagai contoh, brosur atau buku kecil karya Soewardi Soerjaningrat yang berjudul *Seandainya Saya Warga Belanda (Als ik eens Nederlander was)* dilarang karena isinya mengecam selebrasi 100 tahun lepasnya Belanda dari penjajahan Perancis di tahun 1913 yang dirayakan di Hindia Belanda. Selain dilarang brosurnya, penulisnya sendiri diasingkan ke negeri Belanda.⁶

Masih di masa yang sama, librisida juga hadir dengan bentuk yang berbeda. Menurut beberapa sumber, pemenjaraan dan pelarangan, kontrol terhadap peredaran buku juga ditemukan pada masa ini. Buku-buku tertentu bukan hanya disita dari peredaran, tetapi juga tidak diizinkan untuk terbit. Dalam jurnal karya A Teeuw, kita dapat melihat bahwa kontrol terhadap peredaran buku terjadi di masa kolonial dilakukan oleh satu-satunya badan penerbit milik pemerintah, yaitu Balai Pustaka. Balai Pustaka yang telah berdiri pada tahun 1926 berperan besar sebagai salah satu badan sensor yang menyaring berbagai karya yang dianggap mengganggu eksistensi pemerintah kolonial pada waktu itu. Sebagai contoh, novel berjudul *salah asuhan* karya Abdul Moeis menjadi salah satu target dari pemberangusan buku masa kolonial karena dianggap mencemari nama baik orang-orang Eropa.⁷

⁶ Iwan Awaluddin Yusuf and others, *Pelarangan Buku Di Indonesia* (Yogyakarta: P2R Media, 2010). Hal 40.

⁷ A. Teeuw, 'The Impact of Balai Pustaka on Modern Indonesian Literature', *SOAS Bulletin*. Hal 121.

Pasca pemerintahan Hindia berakhir, hal yang sama terus berlanjut bahkan dengan eskalasi yang jauh meningkat setelah Indonesia merdeka. Dimulai pada akhir dekade 1950-an, praktik pelarangan buku mulai muncul kembali di Indonesia. Hal ini ditandai dengan disahkannya peraturan No. PKM/001/9/1956 yang mengontrol kebebasan berekspresi. Dengan dalih menjaga ketertiban umum, lewat peraturan ini negara menyita buku yang dianggap memuat penghinaan terhadap pejabat negara dan juga mempersulit penerbitan karya-karya tulis.⁸ Contohnya, pada masa demokrasi termepimpin, Presiden Soekarno mengeluarkan pernyataan untuk melarang sejumlah penulis yang tergabung dalam Manifes Kebudayaan untuk menerbitkan karyanya.⁹

Setelah Orde Lama berakhir, Puncak librisida di Indonesia terjadi di bawah pemerintahan Soeharto. Orde Baru dapat dikatakan sebagai salah satu contoh nyata intervensi dari pemerintah terhadap kebebasan berkespresi lewat buku. Dengan kebijakan tertulis pada masa Orde Baru, negara dapat dengan leluasa melarang buku yang bersebrangan dengan pandangan politiknya. Bukan hanya bukunya yang dilarang terbit, pada masa Orde Baru penulis-penulisnya juga harus mendekam di balik jeruji besi. Contoh nyatanya ada pada keluarnya Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No 051/J.A/05, yang berdasar kepada penjagaan ketertiban umum sehingga barang-barang yang dianggap mengganggu ketertiban diamankan.

Dalam perspektif luar pemerintah, Orde Baru seringkali melarang buku dengan ideologi yang dianggap kontras terhadap pemerintah, meskipun cenderung

⁸ Yusuf and others. Hal 46.

⁹ Tim ISSI, 'Yang Dilarang Menulis', *Institut Sejarah Sosial Indonesia*.

tidak dapat dibuktikan. Pada masa ini, hampir setiap tahun berbagai judul buku disita dan dilarang beredar. Sebagian besar buku-buku yang dilarang adalah buku dengan tema komunis dan juga buku-buku dari penulis Cina. Sebagai contoh, *Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto* karya John Roosa menjadi salah satu buku populer yang sempat dilarang karena menjelaskan gerakan 30 September sebagai salah satu penelitian akademik. Selain itu, karya penulis Cina Siau-w Giok Tjhan dengan judul *Lima Jaman : Integrasi Wajar* juga dilarang pada tahun 1982 oleh Kejaksaan Agung setahun setelah penerbitan pertamanya.¹⁰

Namun pelarangan buku di masa Orde Baru tidak hanya sesederhana itu, dalam praktiknya pula, periode Soeharto ini juga pernah melakukan pelarangan terhadap buku-buku dengan tema religi. Contohnya pada karya Hamran Abie berjudul *Almasih yang Dijanjikan* atau *Jesus atau Paulus* yang notabene adalah buku-buku bertema agama kristen.¹¹

Demikian pula dengan buku-buku bertema agama Islam, seringkali tema-tema buku tersebut menjadi salah satu sasaran dari pelarangan buku di masa ini. Tema-tema Islam politik atau beberapa buku Islam yang dianggap sesat biasanya disita dan dilarang untuk terbit. Sebagai contoh, kita dapat melihat judul *Al-Islam Nusjuu'uhu Wa Mustaqbaluhu* karya Muhyidinov di tahun 1973 dilarang oleh kejaksaan agung karena dianggap sesat dan menyesatkan. Berkaitan dengan hal

¹⁰ Tim ISSI, 'Dilarang Membaca Buku-Buku Ini', *Sejarah Sosial Indonesia*. Lihat daftar nomer 130 dan 258.

¹¹ ELSAM, *Daftar Pelarangan Buku (1968-1992)*, 1999.

tersebut, peristiwa librisida terhadap buku bertema Islam nampaknya dapat kita lihat dari pola hubungan Islam dan Negara.

Secara politik, sejak awal Orde Baru terjadi ketegangan antara Islam dan negara. Meskipun pada dekade 90-an Soeharto menyambut baik orang-orang Muslim dalam politik, akan tetapi setelah dua dekade pemerintahannya, banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintah Orde Baru yang kurang berpihak kepada Islam. Asas tunggal atau peristiwa tanjung periok adalah contohnya. Hal ini terjadi karena peristiwa pemerotakkan NII, PRRI/Permesta dan ketidakseragaman pemikiran menjadikan Islam politik dianggap ancaman. Sehingga dapat dipastikan bahwa librisida terhadap buku-buku Islam menjadi sebuah upaya Soeharto untuk mengatasi ancaman ini.

Melihat fakta-fakta di atas, maka jelaslah bahwa pelarangan buku dalam sejarah Indonesia mungkin terjadi sejak lama, tetapi fakta-fakta sejarah mengungkap bahwa masa Soeharto menjadi sebuah titik balik dari. Secara motif, sebagian besar dikarenakan alasan politik dan keagamaan. Para pelakunya mungkin individu, kelompok ataupun instansi.

Melihat hal tersebut, kajian ini secara spesifik akan membahas sejarah pelarangan buku di Indonesia pada masa Orde Baru. Studi ini berusaha menampakkan proses librisida secara narasi diakronis sebagai pola utama menampilkan susunan peristiwanya. Disamping itu, aspek sinkronis juga diberikan untuk mengatur peristiwa. Secara pendekatan, *stand point* kajian ini ada pada *out of group*. Artinya perspektif yang digunakan pada penelitian ini adalah perspektif

di luar pemerintahan atau dapat dikatakan sebagai perspektif di luar kekuasaan pemerintahan, meskipun tidak mengabaikan keterangan dari pemerintahan lewat naskah undang-undang.

Kajian ini secara kronologis dan geografis dipilih setepat mungkin untuk membatasi kajian. Secara kronologis, studi ini dimulai pada sekitar tahun 1968 hingga tahun-tahun terakhir kejatuhan Orde Baru. Ini adalah sebuah durasi waktu yang penting dari kajian ini karena pada periode ini sebagian besar buku dilarang oleh pemerintah Orde Baru. Sementara itu di saat yang sama, secara geografis kajian ini hanya melihat librisida dalam bentuk pelarangan terhadap buku-buku Islam. Dengan dua pembatasan secara kronologis dan geografis tersebut diharapkan kajian ini akan mudah untuk dikerjakan.

Lebih jauh, ketertarikan dalam meneliti pelarangan buku Islam di masa Orde Baru didorong oleh beberapa faktor. Yang paling utama adalah ketertarikan pribadi terhadap represi terhadap literatur Islam Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Orde Baru membunuh buku-buku Islam di hampir setiap tahun pemerintahannya tercatat dari 1971 hingga 1990-an, meskipun di saat yang hampir bersamaan kondisi penerbitan buku Islam berkembang secara pesat. Pada masa-masa pelarangan buku oleh pemerintah di pertengahan masa Orde Baru, penerbit Mizan dan Gema Insani Press berdiri dan menjadi sebuah titik balik bagi sejarah penerbitan buku-buku Islam di masa Orde Baru.

Alasan lain yang menjadi pertimbangan utama adalah karena hingga hari ini, peristiwa librisida masih terjadi Contohnya dapat kita lihat di awal tahun 2019,

Penyitaan buku massal di beberapa kota masih terjadi atas pertimbangan stabilitas nasional.¹² Sehingga, dengan dua alasan utama tersebut, kajian librisida dirasa cukup menarik dan relevan untuk diangkat sebagai penelitian sejarah.

Hal berikutnya adalah meskipun penelitian terhadap pelarangan buku di Indonesia telah beberapa kali diteliti, namun penekanan sejarah represi literatur pada tema buku tertentu tidak banyak dilakukan, terutama pada tema Islam. Oleh karenanya, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan dan manfaat yang besar terhadap isu-isu represi dan juga diskursus literatur Islam.

Hal terakhir adalah kemudahan akses sumber. Meskipun sumber dari penelitian ini cenderung sensitif, saya pribadi beranggapan bahwa sumber-sumber tersebut dapat diakses demi kepentingan penelitian, mengingat bahwa beberapa buku terkait librisida berhasil diterbitkan sebelumnya.

Dari penjelasan di atas maka studi ini mengambil judul, “*Sejarah Librisida terhadap Buku-Buku Islam di Masa Orde Baru (1968-1996)*” sebagai judul skripsi. Kajian ini telah mempertimbangkan aspek waktu dan objek secara jelas dan rinci sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian sejarah adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana hubungan Politik Orde Baru dengan umat Islam dan Kebijakannya terhadap Umat Islam?

¹² Irfan Teguh, ‘Mengapa Razia Buku Kiri Terus Terjadi?’, *Tirto.Id*, 2019.

2. Bagaimana Kondisi Penerbitan Islam di masa Orde Baru?
3. Bagaimana Praktik Librisida di Indonesia pada masa Orde Baru?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang telah diajukan, maka penelitian ini dimaksudkan untuk.

1. Mengetahui hubungan Politik Orde Baru dengan umat Islam dan Kebijakannya terhadap Umat Islam.
2. Mengetahui Kondisi Penerbitan Islam di masa Orde Baru
3. Mengetahui Praktik Librisida di Indonesia pada masa Orde Baru.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa buku dan riset yang telah dilakukan oleh orang lain yang digunakan oleh penulis sebagai pembandingan dan juga berfungsi untuk melihat posisi penulis dalam menuliskan sejarah pelarangan buku-buku Islam di masa orde baru. Dan karena penulis menggunakan ‘kebencian’ terhadap buku sebagai tolak ukur, penelitian-penelitian di bawah dapat dikatakan sebagai refleksi penulis dalam melihat pelarangan buku.

Pertama adalah buku berjudul *Libricide: The Regime Sponsored Destruction of Books and Libraries in the Twentieth Century* yang terbit di London pada tahun 2003 dan diterbitkan oleh Praeger. Judul yang saya ambil terinspirasi dari karya Rebecca Knuth ini yaitu librisida. Selain judulnya yang menjadi salah

satu fitur menarik, pendekatan studi ilmu politik Rebecca juga nampak sangat berbobot. Sehingga buku ini menjadi salah satu acuan saya dalam mengkaji sejarah librisida.

Kedua, *Rachel Potter : Obscene modernism (Modern Literature Censorship : 1900-1940)*, diterbitkan di Inggris oleh Oxford University pada tahun 2013. Buku ini meneliti bagaimana sejarah sensor-sensor konten seks. Bersamaan dengan konten-konten seksual, sensor juga mengalami transformasi. Meskipun pada awalnya bertujuan baik, sensor seksual ini digunakan sebagai senjata politis pada akhirnya untuk menjatuhkan beberapa penulis-penulis oposisi pemerintah. Hal ini menjadi paradoks dalam kebebasan berkarya. Menariknya, buku ini juga meneliti bagaimana respon-respon penulis yang tulisannya terjaring sensor seksual ini. Perbedaan penelitian ini dengan Rachel ada pada objek yang diteliti. Rachel meneliti terkait dengan sensor dalam konteks seksual, berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji pelarangan buku dalam pendekatan politik.

Ketiga, *Robert Darnton- Censors at Work ; How State Shaped Literature*, diterbitkan di Inggris oleh British Library pada tahun 2014. Dalam buku ini, Darnton mengkaji terkait dengan tiga supresi literature di tiga belahan peradaban. Yang pertama adalah Perancis di abad ke 18, kedua adalah India di masa Kolonial dan ketiga adalah Jerman Timur di masa pemerintahan komunis. Hal yang menarik dari Robert Darnton adalah analisis kritis yang ia tuliskan. Maka dari itu, buku ini digunakan sebagai *framework* dalam menjelaskan kerangka analisis.

Keempat, Ben Kafka, *The Demon of Writing ; Powers and Failures of Paperwork*, diterbitkan di New York, AS oleh penerbit Zone Books pada tahun 2012. Karya fenomenal dari Ben Kafka mengkaji terkait dengan pengaruh kertas kerja administrative dalam sejarah. Kertas kerja yang dimaksud seperti ; surat-surat militer, pengadilan dan kertas administratif lain yang berkaitan. Ia menjelaskan bagaimana kertas-kertas ini dalam arus sejarah. Berkaitan dengan penelitian ini, Karya Kafka ini digunakan sebagai *framework* dalam menjelaskan analisis.

Kelima, Robert Darnton, *Poetry and the Police (Communication Networks in Eighteenth century Paris*, diterbitkan di London, Inggris oleh Harvard University Press pada tahun 2010. Buku ini adalah studi tentang metode-metode komunikasi antara public dengan pemerintah di abad 18 Perancis. Hal yang menarik dari buku ini adalah bagaimana ekspresi komunikasi antara rakyat dengan pemerintahnya terefleksi dengan puisi. Berkaitan dengan kata *police* di dalam judul merujuk pada bagaimana Darnton mengumpulkan sumber. Sumber-sumber yang digunakan Darnton adalah hasil-hasil interview orang-orang yang menghasilkan satire lewat puisi. Maka dari itu, buku ini menarik dari segi pengumpulan sumber. Berkaitan dengan buku ini, penulis mencoba mengaplikasikan bagaimana Darnton menggunakan dan mengumpulkan sumber lewat kajian *heuristik* secara tidak langsung.

Keenam adalah artikel dari Robertus Robert berjudul *Librisida : Pemurnian Masyarakat dan Demokrasi Yang Cacat*, yang diterbitkan di Jakarta oleh Elsam dan Dewan Kesenian Jakarta di tahun 2010 dalam rangka kuliah umum tentang pelanggaran buku. Di dalam artikel tersebut, Robert menjelaskan tentang Librisida

yang terjadi di Indonesia pada masa pasca Orde Baru. Dengan kata lain, artikel ini memiliki tujuan untuk membandingkan bagaimana Librisida yang terjadi di masa kontemporer dengan yang sebelumnya. Kajian ini juga yang memberikan gambaran kepada saya bahwa pelarangan merupakan bentuk Librisida yang relatif lembut dibandingkan pembakaran atau pemusnahan massal. Terkait perbedaan dengan skripsi saya tentu terletak pada dimensi waktu. Saya berkonsentrasi pada masa Orde Baru, sedangkan artikel ini berfokus kepada kajian kontemporer.

Ketujuh adalah jurnal karya Muhammad Iqbal dari IAIN Palangkaraya berjudul *Pelarangan Buku di Indonesia Era Orde Baru : Perspektif Panoptikon Michael Foucoult*, diterbitkan di Jurnal Agastya volume 9, No 1 tahun 2019. Jurnal ini membahas bagaimana sejarah pelarangan buku di Indonesia masa Orde Baru dengan menggunakan perspektif publik. Selain menengok sejarah pelarangan buku, ia juga memperlihatkan implikasi fenomena ini terhadap pendisiplinan masyarakat. Terkait perbedaan dengan kajian skripsi ini terletak dari objek yang dikaji. Pada jurnal ini, Iqbal melihat pelarangan buku secara umum, sedangkan kajian skripsi ini hanya melihat buku-buku Islam yang dilarang.

Kedelapan adalah jurnal berjudul *Ideological Factors of Islamic Reference Books Published in Indonesia* karya Siti Maryam dari UIN Jakarta yang diterbitkan di jurnal *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, volume 154 di tahun 2017. Jurnal ini menjelaskan faktor non-bisnis terhadap buku-buku Islam yang diterbitkan di Indonesia. Oleh karenanya, jurnal ini sangat penting bagi kajian skripsi ini terutama untuk bagian kedua yang melibatkan kondisi penerbitan buku-buku Islam di masa Orde Baru.

Kesembilan adalah jurnal berjudul *Pelarangan Buku-Buku Karya Sastrawan Lekra Tahun 1965-1968* yang ditulis oleh Dwi Kartikasari dari Universitas Negeri Surabaya yang diterbitkan oleh Jurnal Avatara Volume 2, No 3 di tahun 2014. Jurnal yang disusun berdasarkan skripsi ini menjelaskan pelarangan buku-buku karangan sastrawan Lekra di awal Orde Baru dan juga dampak dari pelarangan tersebut bagi penulis sastra. Perbedaan jurnal ini dengan kajian skripsi ini tentu terletak pada objek yang dikaji. Jurnal tersebut melihat karya dari sastrawan Lekra, sedangkan kajian skripsi ini berfokus kepada buku-buku Islam yang dilarang.

Kesepuluh adalah *Lost Libraries: The Destruction of Great Books Collections since Antiquity*, terbit di New York oleh Palgrave Macmillan di tahun 2004. Jurnal ini menjelaskan tentang sejarah dokumen-dokumen yang hilang dan dihancurkan. Hal yang menarik di sini adalah perspektif dalam penelitian yang dilakukan. Kumpulan penulis melihat penghancuran serta penghilangan dari dokumen-dokumen sejarah pra-modern disebabkan berbagai faktor, salah satunya adalah tindakan manusia. Artinya penelitian-penelitian ini melihat bagaimana hancurnya perpustakaan dan koleksinya di masa lampau. Perbedaan kajian ini dengan skripsi terletak di kurun waktu yang digunakan, sedangkan penelitian saya akan fokus kepada dilarangnya buku-buku di masa kontemporer.

Terakhir saya turut menyerakan laporan Human Right Watch berjudul *Academic Freedom in Indonesia : Dismantling Soeharto-Era Barriers* yang

diterbitkan tahun 1998 di Amerika. Laporan lembaga tersebut memuat pelanggaran Soeharto terhadap hak asasi manusia, termasuk pembatasan pengungkapan pendapat yang diimplementasikan lewat pelarangan buku. Laporan ini sangat berguna untuk melihat bagaimana perspektif politik dari pelarangan buku pada masa Orde Baru.

E. Metode Penelitian

Secara bahasa, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu *syajarah*, yang artinya pohon, akar, keturunan, dan asal-usul. Hal tersebut dinamakan demikian karena fokus awal dari pembahasan sejarah adalah penelusuran terhadap geneologi yang umumnya digambarkan seperti pohon yang bercabang-cabang. Sehingga tak dapat diragukan, penelitian sejarah memiliki tahapan kerjanya sendiri.¹³

Metode penelitian sejarah berguna sebagai metode pengujian dan analisis kesaksian sejarah untuk menemukan data yang otentik yang dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data atau fakta sejarah menjadi satuan kisah yang layak dibaca dan dapat dipercaya.¹⁴ Sehingga kajian metodologis menjadi sangat penting bagi suatu penelitian sejarah.

Dalam proses penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu *heuristik* (pencarian sumber sejarah), *kritik* (penilaian sumber), *Interpretasi* (penjelasan sejarah), *Historiografi* (penulisan sejarah). setelah

¹³ Sulasman, *Metode Penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).Hal. 15.

¹⁴Gottschalk Louis, *Mengerti Sejarah* (Depok: Universitas Indonesia, 1975). hlm.31.

melakukan empat tahapan tersebut, maka hasil akhirnya tersaji dalam bentuk karya tulis ilmiah.

1. Heuristik

Heuristik secara sederhana dapat digambarkan sebagai pencarian sumber. Secara kompleks, tahap ini adalah langkah awal yang melibatkan proses pencarian sumber-sumber baik berupa buku, dokumen, arsip, dan gambar-gambar (foto) yang terkait dengan objek penelitian yang akan dikaji, baik itu sumber primer maupun sumber sekunder yang akan menunjang pengerjaan proposal.¹⁵

Terkait dengan jenis penelitian, kajian ini termasuk studi pustaka. Sehingga pencarian sumber pustaka menjadi sesuatu yang utama. Dalam proses pencarian sumber-sumber bagi rancangan penelitian sejarah ini, kunjungan banyak dilakukan ke perpustakaan daerah Jawa Barat juga perpustakaan kabupaten Bandung dan terutama perpustakaan Batu Api yang terletak di Jatinangor. Akhirnya, sebagian besar sumber primer yang penulis dapatkan berasal dari Perpustakaan Batu Api, Jl. Raya Jatinangor no.142 A diantaranya ; daftar-daftar buku-buku yang dilarang pada masa Orde Baru hingga reformasi. Dalam perencanaan penelitian ini pula, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat yang terletak di Jakarta menjadi salah satu tujuan. Diharapkan dengan mendatangi tempat tersebut, sumber-sumber terkait dengan pelarangan buku Islam di masa Orde baru dapat ditemukan. Pelacakan sumber juga dilakukan lewat internet. Dalam jejaring internet, situs Insitut Sejarah Sosial Indonesia juga menjadi pertimbangan sebagai salah satu tempat untuk mendapatkan

¹⁵ Kuntowidjoyo, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987).hlm.10-19.

sumber. Ditambah lagi, beberapa buku acuan dalam meneliti tulisan ini juga berasal dari Batu Api. Agar lebih jelas, dalam pencarian sumber ke Perpustakaan Batu Api, penulis berhasil mengumpulkan beberapa sumber primer dan sekunder, yaitu:

1. Sumber primer

- a. Daftar Buku-Buku Terlarang yang didasarkan lewat Keputusan Jaksa Agung dari 1968 hingga 1998.
- b. Undang –undang No.4/PNPS/1963 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetak yang mengancam ketertiban umum. Undang-undang ini masih digunakan untuk memberangus buku-buku di masa Orde Baru.
- c. Naskah Keputusan Jaksa Agung tentang *Clearing House* tahun 1989 dan 1996. Selain itu, beberapa naskah keputusan Jaksa Agung tentang pelarangan juga disertakan, meski sebagian besar sudah musnah.
- d. Daftar Buku-Buku terlarang yang disusun oleh P2R Media.
- e. Daftar Buku-Buku terlarang yang disusun oleh Insitut Sejarah Sosial Indonesia
- f. Buku *Menentang Peradaban* yang menjelaskan bagaimana pelarangan buku di masa Orde Baru dalam perspektif hukum. Buku ini terbit satu tahun setelah Orde Baru tumbang, sehingga dapat dikatakan buku ini ditulis pada masa Orde Baru dan baru terbit di masa reformasi. Hal ini mungkin terjadi karena Orde Baru sangatlah ketat dalam penerbitan buku.

2. Sumber Sekunder

- a. *Fahrenheit 451*, Ray Bradbury. Novel yang menggambarkan penghancuran buku di masa pasca perang dunia kedua. Novel ini menjadi salah satu acuan dalam menarasikan librisida.
- b. *Robert Darnton, How State Shaped Literature*. buku ini menjelaskan bagaimana pelarangan dan penyitaan buku oleh pemerintah lewat kebijakan dan aparatur negara di tiga tempat dan periode yang berbeda. Karya Darnton ini menjadi acuan untuk menjelaskan bagaimana narasi-narasi yang digunakan dalam mengungkapkan represi literasi yang dilakukan oleh pemerintah.
- c. *Paper World : The Materiality of Loss in the Pre Modern Age*. Karya John Gagne. Pada karyanya, Gagne menjelaskan bagaimana buku-buku hancur baik karena faktor alam ataupun manusia sebelum abad ke- 20.

Selain beberapa tempat mendapatkan sumber tersebut, kunjungan ke Perpustakaan Provinsi Jawa Barat yang terletak di Jl. Kawalayaan juga dilakukan. Dalam kunjungan ke perpustakaan ini, beberapa buku terkait dengan kondisi politik dan bagaimana Orde Baru menghasilkan kebijakan-kebijakan politiknya dapat diakses. Maka dari itu, dapat dikatakan buku-buku tersebut adalah sumber-sumber tersier bagi penelitian ini.

Sebagai tambahan, pencarian terhadap beberapa jurnal terkait dengan bagaimana meneliti pelarangan buku juga menjadi penting. Pencarian dikonsentrasikan di internet dan situs-situs *free source* resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, beberapa jurnal terkait dengan pelarangan buku-buku Islam didapatkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kritik

Kritik merupakan evaluasi terhadap sumber yang didalamnya mencakup kritik eksternal dan internal terhadap sumber yang akan digunakan. Dalam hal ini yang harus diuji adalah keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik ekstern dan intern, sesuatu yang krusial namun terkadang luput dari perhatian.¹⁶

Dalam tahapan kritik eksternal, sumber-sumber primer yang didapatkan dapat dikatakan sebagai sumber yang lulus uji. Dimulai dari buku *Menentang Peradaban* yang diterbitkan oleh ELSAM yang seringkali berhadapan dengan kasus-kasus yang melibatkan kebebasan berekspresi. Buku ini diterbitkan di tahun 1999 sesaat setelah Orde Baru runtuh yang berarti buku ini disusun di akhir masa Orde Baru, merefleksikan bahwa buku ini kemungkinan besar adalah sumber primer yang lulus uji. Selanjutnya adalah daftar buku-buku terlarang dari ELSAM, Insitut Sejarah Sosial Indonesia dan P2R Media. Daftar buku-buku ini secara nyata memang dilarang pada masa Orde Baru dengan dasar Undang-Undang yang

¹⁶ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2011). Hal 108

dikeluarkan pada masa tersebut. Fakta ini didapatkan dari perbandingan jurnal-jurnal lain dan data-data dari Internet yang mengatakan bahwa buku-buku tersebut secara nyata terlarang di masa Orde Baru. Disamping itu, tiga institusi tersebut seringkali terlibat dalam isu-isu kebebasan berekspresi, khususnya dalam hal pelarangan buku. ELSAM dan Insitut Sejarah Sosial Indonesia memiliki arsip khusus terkait dengan daftar buku-buku tersebut. P2R Media menuliskan daftar tersebut bersamaan dengan lampiran buku yang mereka terbitkan tentang tema terkait. Yang terakhir adalah naskah-naskah Undang-undang terkait. Naskah-naskah tersebut adalah hasil dari *scanning* yang didapatkan langsung dari arsip ELSAM. Dari segi fisik, tinta-tinta yang sudah mulai memudar menandakan bahwa naskah-naskah tersebut adalah naskah asli yang sejaman.

Adapun terkait dengan kritik internal atau kritik yang berkaitan dengan isi, maka dirasa sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini juga layak untuk diajukan. Undang-undang tersebut yang berisi tentang legitimasi untuk melakukan penyitaan dan pelarangan buku secara legal adalah sumber-sumber yang cocok bagi kajian ini. Selain isi naskah-naskah tersebut, data-data dari ELSAM, ISSI dan P2R Media adalah sumber yang berisi data yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini karena masing-masing insitusi tersebut secara independen melakukan penelitian terkait dan tidak memiliki jaringan dengan organisasi apapun baik yang berpihak pada pemerintah ataupun oposisinya, sehingga data-data yang didapatkan berisi fakta yang otentik.

Adapun sumber-sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan sebagai pisau analisis bagi kajian pelarangan buku Islam adalah buku-buku yang telah teruji

dan banyak menjadi sumber rujukan dalam penelitian kebencian terhadap buku. Sehingga dirasa, buku-buku sekunder tersebut dapat membantu penulisan ini menjadi tulisan yang utuh dan baik.

3. Interpretasi

Tahapan selanjutnya dalam metode sejarah adalah interpretasi. Tahapan ini melibatkan penafsiran fakta-fakta sejarah serta melihat makna dan keterkaitan dari fakta-fakta tersebut.¹⁷ Hubungan dari fakta-fakta tersebut kemudian dianalisis menggunakan beberapa pendekatan. Namun tidak sembarang pendekatan dapat cocok menjadi sebuah analisis.

Terkait skripsi ini, kajian yang berjudul *Sejarah Librisida terhadap Buku-Buku Islam pada Masa Orde Baru (1968-1996)* akan fokus mengungkap peristiwa pelarangan buku dengan menggunakan pendekatan sejarah politik atau *political history*. Menurut Edward A. Freeman, Sejarah politik telah menjadi pendekatan tertua dalam menulis sejarah, karena tulisan-tulisan sejarah awal tidak lepas dari intervensi politik.¹⁸ selain itu, Josh Tosh menjelaskan bahwa sejarah politik memiliki dasar bahwa negara, sebagai organisasi politik dalam skala besar, merupakan penggerak sejarah. Dengan demikian, kajian sejarah politik akan melibatkan institusi-institusi negara, kepentingan negara dalam melegitimasi kekuasaannya dan kebijakan-kebijakan yang negara terbitkan untuk mengatur warga negaranya. Secara sederhana, pendekatan ini memotret negara sebagai

¹⁷ E. Kosim, *Sejarah : Asas Dan Proses* (Bandung, 1984). hal 34. Untuk lebih lengkap, lihat Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang, 2005). hal.103-104.

¹⁸ Edward A. Freeman, *The Methods of Historical Study* (Macmillan, 1886), hal 44.

penggerak sejarah.¹⁹ Dengan kata lain, melihat beberapa landasan teori di atas, sejarah politik nampak didominasi oleh kepentingan politik negara dalam menjalankan kekuasaannya.

Dengan menggunakan sejarah politik sebagai acuan dasar, teori *libricide* atau *librisida* dari Rebecca Knuth yang telah disinggung pada bagian sebelumnya menjadi relevan untuk dijelaskan karena ia berpengaruh terhadap cara memandang pelarangan yang diakibatkan oleh kepentingan politik. Dalam karyanya berjudul *Libricide: The Regime Sponsored Destruction of Books and Libraries in the Twentieth Century* ia menjelaskan bahwa pelarangan buku yang terjadi secara sengaja dan sistematis terjadi karena adanya perbedaan ideologi dan kepentingan politik. Ia percaya suatu rezim mungkin menganggap buku sebagai alat musuh untuk melawan kekuasaan. Oleh karenanya, dalam melihat pelarangan buku secara politik, kita juga harus memotret apa kepentingan politik dan bagaimana perbedaan ideologi sebuah kekuasaan dengan isi buku yang dilarang tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori sejarah politik dan kontrol negara, kajian *librisida* secara historis pada studi ini memfokuskan pada masa pemerintahan Soeharto dan kelompok Islam politik yang berada di luar lingkaran pemerintahan. Terkait dengan hal tersebut, secara politik Orde Baru dan Islam memiliki konflik kepentingan politik yang dinamis. Jika berefleksi pada pendekatan Rebecca Knuth, maka diawali oleh fakta bahwa Peristiwa DI/TII, PRRI/Permesta dan polemik pemikiran Islam dengan negara di masa lalu membuat trauma tersendiri dalam

¹⁹ John Tosh, *The Pursuit of History* (London: Pearson Education, 2002), hal 128.

benak Pemerintah Orde Baru dan pemerintah menganggap bahwa peristiwa tersebut terjadi akibat pemikiran yang berbeda dengan visi dan misi mereka. Sehingga mereka menganggap bahwa laporan-laporan terkait buku Islam yang mengganggu ketertiban umum harus diproses. Pada tahap selanjutnya, buku-buku tersebut dilarang lewat kebijakan yang dikeluarkan Jaksa Agung. Dengan proses tersebut, terlihat bahwa cara melihat Rebecca Knuth nampaknya dapat diaplikasikan untuk menjelaskan bagaimana pelarangan dapat terjadi karena melibatkan perbedaan kepentingan politik, perbedaan ideologi dan kebijakan yang menyertai pelarangan tersebut.

Sebagai tambahan, pelarangan buku pada masa ini menggunakan mekanisme undang-undang. Beberapa peraturan untuk melarang buku secara bertahap mulai dikeluarkan, seperti, *clearing house* dan lain sebagainya. Pemerintah melakukan ini, seperti telah dijelaskan sebelumnya, beralasan karena beberapa buku mengancam stabilitas nasional dan mengganggu ketertiban umum.

Terkait dengan pendirian saya sebagai peneliti, meskipun pemerintah pada masa Orde Baru mempertimbangkan pelarangan buku sebagai sebuah upaya menjaga ketertiban umum yang telah tertera jelas di dalam keputusan-keputusan, saya cenderung mengobservasi fenomena ini dengan melihat kepada konflik kepentingan politik antara pemerintah dan kelompok Islam politik. Meskipun tak dapat dipungkiri bahwa mungkin beberapa buku memang harus dilarang karena mengancam ketertiban umum, namun dalam kasus buku Islam sebagian besar buku mungkin harus terlibat dalam diskusi mendalam untuk menentukan apakah buku tersebut mengancam ketertiban umum atau sekedar sebuah ekspresi semata.

Selain itu, untuk memahami peristiwa tersebut, maka politik Islam Orde Baru menjadi penting untuk dikaji. Dengan demikian kajian ini menempatkan dua poin yang menjadi fokus utama untuk menjelaskan pelarangan buku bertema Islam. Yang pertama adalah bagaimana mekanisme pelarangan buku di masa Orde Baru. Terakhir adalah bagaimana praktik pelarangan buku-buku Islam di masa Orde Baru.

4. Historiografi

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam metode penulisan sejarah. dalam tahapan ini data yang telah diperoleh kemudian diolah dan direkonstruksi. Data-data tersebut ditempatkan dalam kerangka karangan yang saling berhubungan dalam bentuk penulisan sejarah berupa skripsi.

Historiografi ini fungsinya adalah menyampaikan informasi kepada khalayak dalam memberikan jawaban terhadap perumusan yang diajukan. Pada tahapan ini, penulis menggunakan deskriptif-analitik yaitu menceritakan apa, bilamana, dan siapa yang terlibat di dalamnya. Juga dengan menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG